

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori agensi menjelaskan hubungan (kontrak) antara kedua pihak yaitu pelaku (investor) dan agen (manajer). Teori hubungan agensi digunakan untuk memahami *corporate governance* yang lebih dalam. (Sauqi dkk, 2017) menyatakan bahwa perusahaan memiliki banyak kontrak, seperti pekerja kontrak dengan manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dan kreditor. Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dan manajer perusahaan, dimana antara agen prinsipal bertujuan untuk memaksimalkan utilitas masing-masing dengan informasi yang dimiliki.

Kepemilikan dan kontrol yang dipisahkan dalam suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang menyebabkan konflik kepentingan yang disebut konflik keagenan. Konflik agensi yang muncul antara berbagai pemangku kepentingan dapat terjadi mempersulit dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja positif untuk menghasilkan nilai bagi perusahaan-perusahaan itu sendiri serta pemegang saham (Sauqi dkk, 2017).

Dalam teori agensi yang mengansumsikan bahwa manusia itu selalu *self interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi (Puspita dan Utama, 2016).

Munculnya masalah agensi yang disebabkan oleh konflik kepentingan dan asimetri tersebut informasi dapat menyebabkan perusahaan menanggung biaya agensi. Teori keagenan menyatakan bahwa konflik minat dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat menyelaraskan kepentingan berbagai pihak perusahaan. Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam lembaga teori dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance* (Sauqi dkk, 2017).

Manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi prinsipal. Kurangnya pengguna eksternal mengetahui informasi sebuah perusahaan mengakibatkan pengguna eksternal berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Ketidakseimbangan informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat memicu manajer untuk menyampaikan

informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya (Pratama, 2015).

2. Independensi

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Independensi akuntan merupakan persoalan sentral dalam pemenuhan kriteria objektivitas dan keterbukaan. Dalam peraturan 101 Kode Perilaku Profesional *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) tentang independensi mengatakan bahwa :
“Anggota dalam praktik publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti yang disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan (Mudasetia dan Solikhah, 2017).”

Independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena:

- a. Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan.

b. Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor internal. Dengan demikian, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (Mudasetia dan Solikhah, 2017).

Kode etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan berbagai ukuran. Namun dalam penelitian ini independensi diukur melalui lama

hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan (*peer review*), dan jasa non audit (Subandono, 2015).

Menurut (Oktapiyana dkk, 2018) ada dua aspek independensi, yaitu:

- a. Independensi sikap mental, independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikap independen.
- b. Independensi penampilan, independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

3. Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Oktapiyana dkk, 2018).

Dalam mekanisme *corporate governance* terdapat beberapa proksi yang akan dibahas diantaranya komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit :

a. Komisaris Independen

Komisaris independen menurut ketentuan Bapepam No. Kep 29/PM/2004 adalah :”Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik (Yulianda, 2016).”

Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi menurut (Savero, 2017) :

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.
- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.

- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris.
- 4) Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi dan pertanggung jawaban atas hal ini.
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (OECD) *Principles of Corporate Governance*.

Jadi komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbatas terbuka (Oktapiyana dkk, 2018).

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional dianggap dapat melakukan fungsi monitoring yang efektif dan dapat meminimalisir kecurangan manajemen dalam penyampaian dan penyajian laporan keuangan. Menurut penelitian

(Dewi dan Putra, 2016), kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan institusional memiliki sumber daya dan profesionalisme yang lebih tinggi untuk mengawasi penggunaan aktiva perusahaan dan dapat menguji keandalan dalam menganalisa informasi.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh institusi atau lainnya yang berasal dari luar manajemen perusahaan. Pengawasan terhadap *corporate governance* oleh investor institusi diharapkan mampu mendorong manajemen untuk lebih memusatkan perhatiannya pada kinerja perusahaan, sehingga mengurangi perilaku manajemen untuk melakukan kecurangan dan mengabaikan kepentingan orang lain, terutama kepentingan yang datang dari luar perusahaan (Nurdiniah, 2017).

c. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang memiliki tugas mengawasi atas proses pelaporan keuangan dan audit eksternal. Dalam hal pelaporan laporan keuangan, komite audit bertugas dalam mengawasi dan memonitor audit laporan keuangan dan memastikan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah sesuai dengan standar aturan yang berlaku (Qonitin dan Yudowati, 2018).

Tujuan pembentukan komite audit (Oktapiyana dkk, 2018) :

- 1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
- 3) Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
- 4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam keputusan ketua BAPEPAM Nomor 29/PM/2004 peraturan No. IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris (Santia dan Afriyenti, 2019).

4. Kualitas Audit

Menurut (Tandiontong, 2016), kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara

dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas, relevan dan dapat dipercaya, dihasilkan dari audit yang berkualitas. Pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas dibandingkan dengan auditor yang kurang berkualitas, karena mereka menganggap bahwa dalam mempertahankan kredibilitasnya auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji atau kecurangan (Irawati dan Fakruddin, 2016).

5. Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu bisa juga disebut dengan gambaran dari sebuah perusahaan. PSAK No. 1 (2019) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Mudasetia dan Solikhah, 2017).

Laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat diukur dengan konservatisme. Menurut (Savitri, 2016) konservatisme diterapkan karena akuntansi menggunakan dasar akrual dalam membentuk dan menyajikan laporan keuangan. Dasar akrual ini menyebabkan penerapan konservatisme sebagai antisipasi ketidakpastian aliran uang masuk dan keluar di masa mendatang. Sedangkan konservatisme dalam *Statement of Concepts* No. 2 FASB didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam merespon ketidakpastian dengan memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko bisnis sudah dipertimbangkan secara memadai. Dari berbagai definisi tersebut terlihat bahwa konservatisme akuntansi dianggap sebagai reaksi yang menunjukkan kehati-hatian dalam mengantisipasi adanya ketidakpastian dimasa depan (Susanti dkk, 2019).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Table 2.1 penelitian terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Ayu, I made karya, 2016	Fee Audit sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	1. Fee Audit (X_1) 2. Kualitas Audit (X_2) 3. Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Kualitas audit dan fee audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan 2. Variabel fee audit tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
				keuangan
2.	Anisa, Hexana, 2016	Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Spesialisasi Industri Auditor dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi (X_1) 2. Kualitas Audit (X_2) 3. Spesialisasi Industri Auditor (X_3) 4. <i>Corporate Governance</i> (X_4) 5. Integritas Laporan Keuangan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan 2. Kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan 3. <i>Corporate governance</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan 4. Spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan
3.	Budi Setiawan, 2015	Pengaruh Independensi, Kualitas Audit dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi (X_1) 2. Kualitas Audit (X_2) 3. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_3) 4. Integritas Laporan Keuangan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi, kualitas audit dan mekanisme <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
4.	Amrulloh, Made Asri, Dewa Gede, 2016	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Ukuran KAP, Audit <i>Temure</i> dan Audit Report Lag Pada Integritas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_1) 2. Ukuran KAP (X_2) 3. Audit Report Lag (X_3) 4. Integritas Laporan Keuangan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate governance</i> berpengaruh pada integritas laporan keuangan 2. Ukuran KAP tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan 3. <i>Audit report lag</i> berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
5.	Ahmad Sauqi, Akram, Endar Pituringsih, 2017	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Independensi Auditor dan Kualitas Audit Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_1) 2. Independensi Auditor (X_2) 3. Kualitas Audit (X_3) 4. Integritas Laporan Keuangan (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme <i>corporate governance</i>, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris

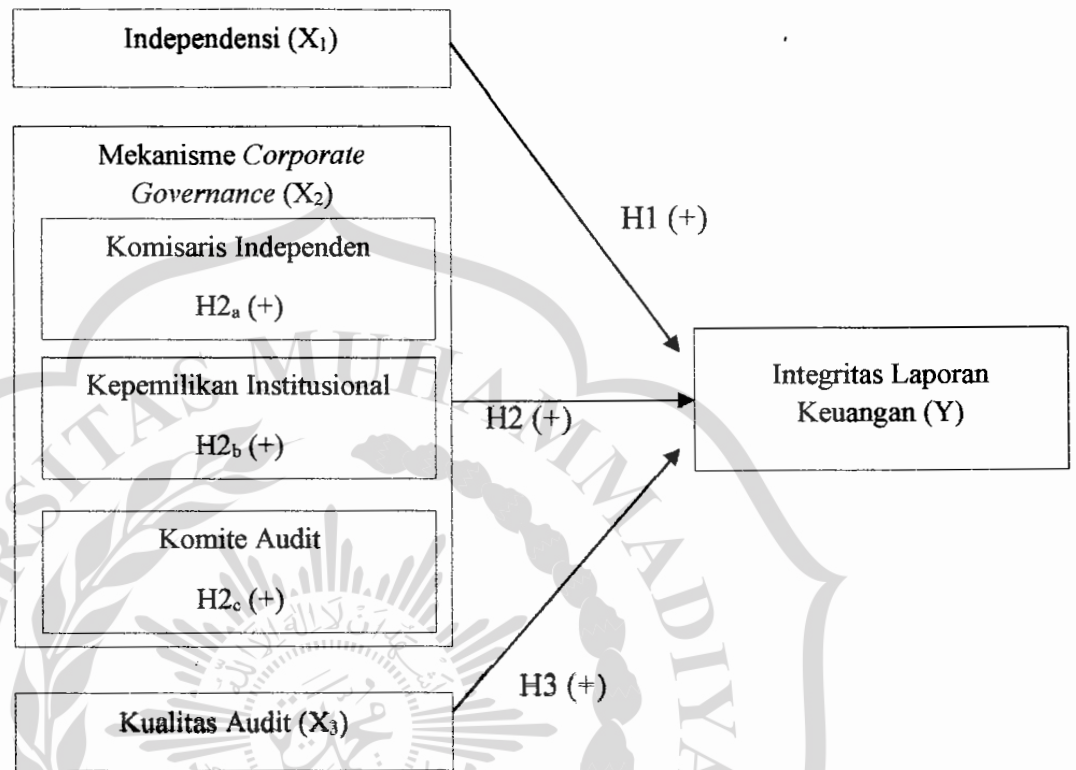
No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
		Intgeritas Laporan Keuangan		independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 2. Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 3. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan
6.	Enni Savitri, 2016	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Moderasi Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan	1. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_1) 2. Moderasi Independensi (X_2) 3. Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Independensi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 2. Kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
7.	Mudasetia, Nur Solikhah, 2017	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	1. Independensi (X_1) 2. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_2) 3. Kualitas Audit (X_3) 4. Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan 2. Mekanisme <i>coporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan 3. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan
8.	Rosyida, Siska, 2018	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	1. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_1) 2. Kualitas Audit (X_2) 3. Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Mekanisme <i>corporate governance</i> dan kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
9.	Erpin, Patricia, Mariska, 2018	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan	1. Independensi (X_1) 2. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_2) 3. Kualitas Audit (X_3) 4. Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Independensi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 2. Mekanisme <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh

No	Penulis & Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil
		Keuangan		terhadap integritas laporan keuangan 3. Kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
10.	Syiar, Yana, Asbar, Ilham, Rini, 2016	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	1. Independensi (X_1) 2. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (X_2) 3. Kualitas Audit (X_3) 4. Integritas Laporan Keuangan (Y)	1. Independensi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 2. Mekanisme <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 3. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian, maka variabel independen penelitian adalah independensi, mekanisme *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit) dan kualitas audit sedangkan variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan. Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Skripsi Nur Solikhah (2017)

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah berikut :

1. Pengaruh Independensi Terhadap Integritas laporan Keuangan

Independensi merupakan suatu standar auditing yang sangat penting karena mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan manajemen yang mana opini kewajarannya dibuat oleh seorang auditor. Terdapat dua aspek independensi yang perlu diperhatikan terutama dalam pengembangan konsep lebih lanjut. Pertama, independensi dalam

arti yang sebenar-benarnya dari auditor secara individual dalam kapasitasnya sebagai praktisi auditing. Kedua, independensi penampilan auditor dalam kapasitasnya sebagai kelompok profesional (Mudasetia dan Solikhah, 2017).

Sebaliknya, penugasan audit yang lama kemungkinan dapat pula meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien, sehingga semakin tinggi independensi semakin tinggi pula integritas laporan keuangan yang dihasilkan (Setiawan, 2015).

H₁ : Independensi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan .

2. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

a. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Selain itu, keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan ekonomi. Komisaris independen merupakan solusi terbaik dalam mengurangi resiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap keintegritasan laporan keuangan (Yulinda, 2016).

Komisaris independen merupakan solusi terbaik dalam mengurangi resiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris independen akan lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan internal perusahaan (Santia dan Afriyenti, 2019).

H_{2a} : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

b. Kepemilikan Institusional Terhadap Integritas laporan keuangan

Kepemilikan institusional yang besar dapat mengurangi pengelola untuk melakukan tindakan *earnings management* dan meningkatkan pengawasan pada perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi laporan keuangan, dengan kepemilikan institusional dalam perusahaan pengelola akan cenderung lebih hati-hati, bertanggung jawab dan fokus dalam menjalankan perusahaan (Amrulloh dkk, 2016).

Kepemilikan institusional yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusi, maka akan ada yang mendorong pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena pemegang saham institusi memiliki kemampuan dan profesional yang baik dalam menilai laporan yang disajikan oleh manajemen.

Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Qonitin dan Yudowati, 2018).

H_{2b} : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

c. Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Pembentukan komite audit bertujuan membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab melakukan pengawasan secara menyeluruh, memeriksa laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, memastikan bahwa internal kontrol perusahaan berjalan dengan baik, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan tujuan pembentukan komite audit inilah, komite audit mempengaruhi kualitas dan integritas laporan keuangan yang dibuat perusahaan (Amrulloh dkk, 2016).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten

dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Mudasetia dan Solikhah, 2017).

H_{2c} : Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Kualitas audit sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas dibandingkan dengan auditor yang kurang berkualitas, karena mereka menganggap bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor berkualitas akan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kualitas audit yang baik juga dapat memungkinkan auditor dalam menemukan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dari hasil audit dapat dijamin keintegritasnya (Qonitin dan Yudowati, 2018).

Tussiana dan Lastanti (2016) menyatakan audit yang dilakukan secara baik dan sesuai standar audit yang berlaku, akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dalam pemeriksaan laporan

keuangan dan menambah kredibilitas laporan keuangan. Sehingga, dapat menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas

H₃ : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

